

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 151.
- Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hal. 11-12.
- Al-Imam Malik ibn Anas bi riwayat Yahya ibn Yahya ibn Kasir al-Laisi al-Andalusi al Qurtubi, *Kitab Al-Muwatta'*, (Bairut: Dar al-Fikr, 2002), Hadis nomor 1461, hal. 454.
- Anselm Strauss dan Juliet Carbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah Dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 4.
- Dewanti Mike, dkk, *Upaya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pengendalian Tembakau*, (Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 05 No. 01 Agustus 2020) hal. 48.
- Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuasin, di akses pada tanggal 19 Agustus 2024.
- dinkes.tulungagung.go.id, diakses pada tanggal 2 Februari 2025.
- Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT), 2019), hal. 13.
- H.A Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 47.
- H.B. Sutopo, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta, Sebelas Maret University Press, 2002), hal. 59.
- Hariyanto, *Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*, (Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol. 1. No. 1, 2018) hal. 59.

Hukumonline.com, *Regulasi Penjualan Rokok Kian Diperketat Dalam PP Kesehatan*, diakses pada tanggal 11 maret 2025.

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 12.

jatim.bpk.go.id, kabupaten-tulungagung, diakses pada 1 Februari 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 1037.

Karjuni Dt. Maani, *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik*, (Demokrasi, Vol. 8 No. 1, 2009), hal. 48-49.

kemkes.go.id, diakses pada tanggal 8 Agustus 2024.

Khabibah Ismi, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Siyasah Dusturiyyah*, (Purwokerto, Universitas Islam Negeri Profesor Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), hal.76.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal .27.

Luthans, *Punishment*, (Jakarta: Karya Abadi, 2005), hal.45.

Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2002).

Mathar Ahmad, *Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (*Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (Vol. 3 No.2, Desember 2023), hal. 47.

Muslim dan Entin Sriani, *Advokasi Pembuatan Citizen Charter untuk Mendorong Pelayanan Publik yang Transparan, Akuntabel dan Responsif*, (Bandung: Balai Diklat LAN, 2006).

Mutiara Fahmi, *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (*Jurnal Petita* Vol 2, no. 1, 2017), hal.37.

- Najwa Marwan, Dwi Putra Nugraha, *Larangan Penjualan Rokok Eceran Guna Menurunkan Jumlah Perokok Di Indonesia*, (Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, Vol.6, No.3, Januari 2024), hal 4.
- Nasution, *Metode Penelitian Research:Peneliti Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 143.
- Panggabean Huda Nurul, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok) Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kantor Walikota Medan)*, (Medan, UIN Sumatra Utara, 2020), hal. 9.
- Pemerintah Kabupaten Tulungagung, *Statistik Daerah Kabupaten Tulungagung 2024*, (Tulungagung: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2024), hal 1.
- Permata Mayang Bunga Tiara dkk, *Pedoman Strategi dan Langkah Aksi Pengendalian Konsumsi Tembakau dan Alkohol*, (Jakarta: Komite Penanggulangan Kanker Nasional (KPKN), 2019), hal. 13-14.
- Program Studi Manajemen FEB Unmas Denpasar, *Manajemen Sumber Daya Manusia Konsep, Pengembangan Dan Aplikasi*, (Bali: CV. Noah Aletheia, 2020), hal.103.
- Qudsiah Amelia, *Implementasi Kebijakan Larangan Penjualan Rokok Pada Anak Dibawah Umur Di Kota Bekasi* (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023) hal.1.
- Rachmat Muchjidin dan Rizma Aldillah Rizma, *Agribisnis Tembakau Di Indonesia: Kontroversi Dan Prospek*, (Bogor, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2016), hal. 77.
- Ramadhan Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fikih Siyasah*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2019), hal 198.
- Rasyidin Utang dan Supriyadi Dedi, *Pengantar Hukum Indonesia: Dari Tradisi Ke Konstitusi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 114.

Ridwan, *Fiqih Politik Gagasan, harapan dan kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press,2007), hal.273.

Riyadi Ema, dkk, *Sejarah dan Babad Tulungagung*,(Tulungagung : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung, 2014), hal 83-85.

satpolpp.tulungagung.go.id, diakses pada tanggal 9 Februari 2025.

Sehatnegeriku.kemkes.go.id, *Tekan Konsumsi Perokok Anak dan Remaja*, diakses pada tanggal 11 maret 2025.

Setiadi Wicipto, *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.6 No.4, Desember 2009), 604.

Situmorang Jubair, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyasah Dusturiyyah*,..., hal. 25.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 273.

Syarif Ibnu Mugar, Khamami Zada, *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama,2008), hal.12.

Tafsiralquran.id, diakses pada tanggal 23 Februari 2025.

Winata Pandu Rayom, *Implementasi Perda Kabupaten Tulungagung Nomer 6 Pasal 31 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Publik Bagi Kelompok Rentan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung*, (Tulungagung, UIN Tulungagung, 2020), hal. 53.

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 35 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004